

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN,
KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/763/M.SM.02.00/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 1/E);
 12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 93/D);
 13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu (Berita

Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 94/D);

14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 119/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 112/D);
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 93/D);
16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 94/D);
17. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 96/D);
18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 97/D);
19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 98/D);
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 99/D);
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 100/D);
22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 101/D);
23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Batu Tahun

Halaman 3 dari 74 hlm...

2021 Nomor 102/D);

24. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 103/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 18/D);
25. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 104/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 19/D);
26. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 106/D);
27. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 107/D);
28. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 108/D);
29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 109/D);
30. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 110/D);
31. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 111/D); 39.
32. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha

Halaman 4 dari 74 hlm...

- Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 113/D);
33. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 114/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 22/D);
 34. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 115/D);
 35. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 116/D);
 36. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 117/D);
 37. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 6/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 32/D);
 38. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 27/D);
 39. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 27/D);
 40. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Batu

Tahun 2023 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor Register 6/D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 40 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 40/D); dan
 - b. Nomor 32 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 32/D);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Faktor Evaluasi Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipergunakan dalam penghitungan Nilai Jabatan dan penetapan Kelas Jabatan bagi JPT, JA, dan Jabatan Pengawas.
 - (2) Faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial/Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b digunakan dalam penghitungan Nilai Jabatan dan penetapan Kelas Jabatan bagi Staf Ahli Wali Kota, Jabatan Pelaksana, dan JF.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

Halaman 6 dari 74 hlm...

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 8/D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**



**Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001**

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 8 Tahun 2025

Tanggal : 18 Maret 2025

**NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGNAN PEMERINTAH KOTA BATU**

| NO | NAMA JABATAN | UNIT ORGANISASI | KELAS JABATAN | NILAI JABATAN |
|------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1. | Sekretaris Daerah | Sekretariat Daerah | 15 | 3555 |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah | 14 | 3030 |
| 3. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah | 14 | 3030 |
| 4. | Asisten Administrasi Umum | Sekretariat Daerah | 14 | 3030 |
| 5. | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | Sekretariat Daerah | 13 | 2715 |
| 6. | Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; | Sekretariat Daerah | 13 | 2715 |
| 7. | Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Kemasyarakatan | Sekretariat Daerah | 13 | 2715 |
| 8. | Kepala Bagian Hukum | Bagian Hukum | 12 | 2315 |
| 9. | Jf Analis Hukum Ahli Madya | Bagian Hukum | 11 | 1960 |
| 10. | Jf Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | Bagian Hukum | 10 | 1610 |
| 11. | Jf Analis Hukum Ahli Muda | Bagian Hukum | 9 | 1355 |
| 12. | Jf Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | Bagian Hukum | 8 | 1280 |
| 13. | Jf Penyuluh Hukum Ahli Pertama | Bagian Hukum | 8 | 1280 |
| 14. | Jf Analis Hukum Ahli Pertama | Bagian Hukum | 8 | 1280 |
| 15. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Hukum | 8 | 1280 |
| 16. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Hukum | 8 | 1280 |
| 17. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Bagian Hukum | 7 | 890 |
| 18. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Hukum | 7 | 890 |
| 19. | Penata Layanan Operasional | Bagian Hukum | 7 | 890 |
| 20. | Dokumentalis Hukum | Bagian Hukum | 6 | 690 |
| 21. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Hukum | 6 | 690 |
| 22. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Hukum | 5 | 490 |

| | | | | |
|-----|---|--|----|------|
| 23. | Kepala Bagian Pemerintahan | Bagian Pemerintahan | 12 | 2315 |
| 24. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Pemerintahan | 10 | 1735 |
| 25. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Pemerintahan | 8 | 1280 |
| 26. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Bagian Pemerintahan | 8 | 1280 |
| 27. | Penata Kelola Pemerintahan | Bagian Pemerintahan | 7 | 890 |
| 28. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Pemerintahan | 7 | 890 |
| 29. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Pemerintahan | 6 | 690 |
| 30. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Pemerintahan | 5 | 490 |
| 31. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 12 | 2315 |
| 32. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 10 | 1735 |
| 33. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1280 |
| 34. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1280 |
| 35. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | 890 |
| 36. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| 37. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Pemerintahan | 5 | 490 |
| 38. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 12 | 2315 |
| 39. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 10 | 1735 |
| 40. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 8 | 1280 |
| 41. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 8 | 1280 |
| 42. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 7 | 890 |
| 43. | Penata Layanan Operasional | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 7 | 890 |
| 44. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 6 | 690 |
| 45. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 5 | 490 |
| 46. | Pengelola Umum Operasional | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 | 190 |
| 47. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | Bagian Administrasi Pembangunan | 12 | 2315 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----|------|
| 48. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Administrasi Pembangunan | 10 | 1735 |
| 49. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Bagian Administrasi Pembangunan | 8 | 1280 |
| 50. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Administrasi Pembangunan | 8 | 1280 |
| 51. | Jf Arsiparis Terampil | Bagian Administrasi Pembangunan | 6 | 740 |
| 52. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/Terampil | Bagian Administrasi Pembangunan | 6 | 740 |
| 53. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Administrasi Pembangunan | 7 | 890 |
| 54. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Administrasi Pembangunan | 6 | 690 |
| 55. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Administrasi Pembangunan | 5 | 490 |
| 56. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 12 | 2315 |
| 57. | Jf Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 12 | 2220 |
| 58. | Jf Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 10 | 1610 |
| 59. | Jf Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 8 | 1280 |
| 60. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 8 | 1280 |
| 61. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 8 | 1280 |
| 62. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 7 | 890 |
| 63. | Penata Kelola Pemerintahan | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 7 | 890 |
| 64. | Pengelola Layanan Pengadaan | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 6 | 690 |
| 65. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 6 | 690 |
| 66. | Pengelola Layanan Operasional | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 6 | 690 |
| 67. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 5 | 490 |
| 68. | Kepala Bagian Umum | Bagian Umum | 12 | 2315 |
| 69. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Umum | 10 | 1735 |
| 70. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Umum | 8 | 1280 |
| 71. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Bagian Umum | 8 | 1280 |
| 72. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Bagian Umum | 8 | 1280 |
| 73. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Bagian Umum | 8 | 1280 |
| 74. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Umum | 8 | 1280 |
| 75. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Umum | 7 | 890 |

| | | | | |
|------|---|---|----|------|
| 76. | Penata Layanan Operasional | Bagian Umum | 7 | 890 |
| 77. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Umum | 6 | 690 |
| 78. | Pengelola Layanan Operasional | Bagian Umum | 6 | 690 |
| 79. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Umum | 5 | 490 |
| 80. | Operator Layanan Operasional | Bagian Umum | 5 | 490 |
| 81. | Operator Layanan Operasional | Bagian Umum | 3 | 340 |
| 82. | Pengelola Umum Operasional | Bagian Umum | 1 | 190 |
| 83. | Kepala Bagian Organisasi | Bagian Organisasi | 12 | 2315 |
| 84. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | Bagian Organisasi | 12 | 2135 |
| 85. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Bagian Organisasi | 10 | 1735 |
| 86. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Bagian Organisasi | 8 | 1280 |
| 87. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Organisasi | 10 | 1735 |
| 88. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Organisasi | 8 | 1280 |
| 89. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Bagian Organisasi | 8 | 1280 |
| 90. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Organisasi | 7 | 890 |
| 91. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Bagian Organisasi | 7 | 890 |
| 92. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Organisasi | 6 | 690 |
| 93. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Organisasi | 5 | 490 |
| 94. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 12 | 2315 |
| 95. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 9 | 1355 |
| 96. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 8 | 1280 |
| 97. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 8 | 1280 |
| 98. | Jf Perencana Ahli Pertama | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 8 | 1280 |
| 99. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 7 | 890 |
| 100. | Penata Layanan Operasional | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 7 | 890 |
| 101. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 6 | 690 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|------|
| 102. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5 | 490 |
| 103. | Kepala Sub Bagian Protokol | Sub Bagian Protokol | 9 | 1430 |
| 104. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Protokol | 7 | 890 |
| 105. | Pengelola Keprotokolan | Sub Bagian Protokol | 6 | 690 |
| 106. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Protokol | 6 | 690 |
| 107. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Protokol | 6 | 690 |
| II. SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| 108. | Sekretaris DPRD | Sekretariat DPRD | 14 | 2865 |
| 109. | Jf Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | Sekretariat DPRD | 10 | 1610 |
| 110. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Sekretariat DPRD | 10 | 1735 |
| 111. | Jf Perisalah Legislatif Ahli Muda | Sekretariat DPRD | 9 | 1355 |
| 112. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Sekretariat DPRD | 9 | 1355 |
| 113. | Jf Perisalah Legislatif Ahli Pertama | Sekretariat DPRD | 8 | 1310 |
| 114. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Sekretariat DPRD | 8 | 1280 |
| 115. | Jf Analis Hukum Ahli Pertama | Sekretariat DPRD | 8 | 1280 |
| 116. | Jf Perisalah Legislatif Ahli Pertama | Sekretariat DPRD | 8 | 1310 |
| 117. | Jf Asisten Perisalah Legislatif Terampil | Sekretariat DPRD | 6 | 740 |
| 118. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Bagian Umum Dan Keuangan | 12 | 2115 |
| 119. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Umum dan Keuangan | 7 | 890 |
| 120. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Umum dan Keuangan | 6 | 690 |
| 121. | Operator Layanan Operasional | Bagian Umum dan Keuangan | 5 | 490 |
| 122. | Operator Layanan Operasional | Bagian Umum dan Keuangan | 3 | 340 |
| 123. | Pengelola Umum Operasional | Bagian Umum dan Keuangan | 1 | 190 |
| 124. | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Sub Bagian Program dan Keuangan | 9 | 1430 |
| 125. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan | 7 | 890 |
| 126. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan | 6 | 690 |
| 127. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan | 5 | 490 |
| 128. | Kepala Sub Bagian Tata | Sub Bagian Tata | 9 | 1430 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|----|------|
| | Usaha Dan Kepegawaian | Usaha dan Kepegawaian | | |
| 129. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 130. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 131. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 132. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 133. | Kepala Bagian Sidang dan Risalah | Bagian Sidang dan Risalah | 12 | 2115 |
| 134. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 7 | 890 |
| 135. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 7 | 890 |
| 136. | Penata Layanan Operasional | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 7 | 890 |
| 137. | Dokumentalis Hukum | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 6 | 690 |
| 138. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 6 | 690 |
| 139. | Pengelola Layanan Operasional | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 6 | 690 |
| 140. | Pengelola Keprotokolan | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 6 | 690 |
| 141. | Pengadministrasi Perkantoran | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | 5 | 490 |
| 142. | Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran | Bagian Fasilitasi dan Penganggaran | 12 | 2115 |
| 143. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | 7 | 890 |
| 144. | Pengolah Data dan Informasi | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | 6 | 690 |
| III. INSPEKTORAT | | | | |
| 145. | Inspektur | Inspektorat | 14 | 3030 |
| 146. | Jf Auditor Ahli Utama | Inspektorat | 14 | 2820 |
| 147. | Jf Auditor Ahli Madya | Inspektorat | 12 | 2250 |
| 148. | Jf Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | Inspektorat | 12 | 2145 |
| 149. | Jf Perencana Ahli Muda | Inspektorat | 10 | 1610 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|------|
| 150. | Jf Auditor Ahli Muda | Inspektorat | 10 | 1610 |
| 151. | Jf Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | Inspektorat | 10 | 1610 |
| 152. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Inspektorat | 9 | 1355 |
| 153. | Jf Pranata Komputer Ahli Muda | Inspektorat | 9 | 1355 |
| 154. | Jf Auditor Ahli Pertama | Inspektorat | 8 | 1280 |
| 155. | Jf Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | Inspektorat | 8 | 1280 |
| 156. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Inspektorat | 8 | 1280 |
| 157. | Jf Perencana Ahli Pertama | Inspektorat | 8 | 1280 |
| 158. | Sekretaris | Sekretariat Inspektorat | 12 | 2140 |
| 159. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Inspektorat | 7 | 890 |
| 160. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Inspektorat | 6 | 690 |
| 161. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Inspektorat | 5 | 490 |
| 162. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 163. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 164. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 165. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 166. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 167. | Inspektur Pembantu I | Inspektur Pembantu Wilayah I | 11 | 1990 |
| 168. | Inspektur Pembantu II | Inspektur Pembantu Wilayah II | 11 | 1990 |
| 169. | Inspektur Pembantu III | Inspektur Pembantu Wilayah III | 11 | 1990 |
| 170. | Inspektur Pembantu Khusus | Inspektur Pembantu Khusus | 11 | 1990 |
| IV. DINAS PENDIDIKAN | | | | |
| 171. | Kepala Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | 14 | 2865 |
| 172. | Jf Penilik Ahli Utama | Dinas Pendidikan | 13 | 2485 |
| 173. | Jf Guru Ahli Utama | Dinas Pendidikan | 13 | 2585 |
| 174. | Jf Pengawas Sekolah Ahli Madya | Dinas Pendidikan | 11 | 1960 |
| 175. | Jf Penilik Ahli Madya | Dinas Pendidikan | 11 | 1930 |
| 176. | Jf Guru Ahli Madya | Dinas Pendidikan | 11 | 1960 |
| 177. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 10 | 1610 |

| | | | | |
|------|---|---------------------------------|----|------|
| 178. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 10 | 1735 |
| 179. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 10 | 1610 |
| 180. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 9 | 1355 |
| 181. | Jf Pengawas Sekolah Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 9 | 1385 |
| 182. | Jf Pranata Komputer Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 9 | 1355 |
| 183. | Jf Penilik Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 9 | 1355 |
| 184. | Jf Guru Ahli Muda | Dinas Pendidikan | 9 | 1385 |
| 185. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 186. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 187. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 188. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 189. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 190. | Jf Penilik Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 191. | Jf Guru Ahli Pertama | Dinas Pendidikan | 8 | 1280 |
| 192. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/ terampil | Dinas Pendidikan | 6 | 740 |
| 193. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Pendidikan | 6 | 740 |
| 194. | Sekretaris Dinas Pendidikan | Sekretariat Dinas Pendidikan | 12 | 2115 |
| 195. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Pendidikan | 7 | 890 |
| 196. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Pendidikan | 6 | 690 |
| 197. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 198. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 199. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 200. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 201. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 202. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 203. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 204. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 205. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 206. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | 11 | 2045 |
| 207. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | 7 | 890 |

| | | | | |
|------|--|---|----|------|
| 208. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | 6 | 690 |
| 209. | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar | 9 | 1430 |
| 210. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar | 7 | 890 |
| 211. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar | 6 | 690 |
| 212. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar | 6 | 690 |
| 213. | Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | 9 | 1430 |
| 214. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | 7 | 890 |
| 215. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | 6 | 690 |
| 216. | Pengadministrasi Perkantoran | Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | 5 | 490 |
| 217. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | 11 | 2045 |
| 218. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | 7 | 890 |
| 219. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | 6 | 690 |
| 220. | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama | 9 | 1430 |
| 221. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama | 7 | 890 |
| 222. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama | 6 | 690 |
| 223. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama | 6 | 690 |
| 224. | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | 9 | 1430 |
| 225. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | 7 | 890 |

| | | | | |
|------|---|--|----|------|
| 226. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | 6 | 690 |
| 227. | Pengadministrasi Perkantoran | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | 5 | 490 |
| 228. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 11 | 2045 |
| 229. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 7 | 890 |
| 230. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 6 | 690 |
| 231. | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 9 | 1430 |
| 232. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 7 | 890 |
| 233. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 6 | 690 |
| 234. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 6 | 690 |
| 235. | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 9 | 1430 |
| 236. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 7 | 890 |
| 237. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 6 | 690 |

| | | | | |
|---|--|---|----|------|
| 238. | Pengadministrasi Perkantoran | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 5 | 490 |
| 239. | Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga | Bidang Pemuda dan Olahraga | 11 | 2045 |
| 240. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemuda dan Olahraga | 7 | 890 |
| 241. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemuda dan Olahraga | 6 | 690 |
| 242. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Pemuda dan Olahraga | 6 | 690 |
| 243. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pemuda dan Olahraga | 5 | 490 |
| 244. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Pemuda dan Olahraga | 5 | 490 |
| 245. | Pengolah Data dan Informasi | UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak | 6 | 690 |
| 246. | Operator Layanan Operasional | UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak | 3 | 340 |
| 247. | Operator Layanan Operasional | UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak | 1 | 190 |
| 248. | Pengolah Data dan Informasi | UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 6 | 690 |
| 249. | Operator Layanan Operasional | UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 3 | 340 |
| 250. | Operator Layanan Operasional | UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1 | 190 |
| 251. | Pengolah Data dan Informasi | UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 6 | 690 |
| 252. | Operator Layanan Operasional | UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 3 | 340 |
| 253. | Operator Layanan Operasional | UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1 | 190 |
| V. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| 254. | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14 | 2865 |

| | | | | |
|------|--|---|----|------|
| 255. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 | 1610 |
| 256. | Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 | 1610 |
| 257. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 | 1735 |
| 258. | Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9 | 1480 |
| 259. | Jf Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9 | 1385 |
| 260. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 | 1280 |
| 261. | Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 | 1280 |
| 262. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6 | 740 |
| 263. | Jf Pengamat Tera Pemula | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5 | 490 |
| 264. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 | 2115 |

| | | | | |
|------|--|---|----|------|
| 265. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7 | 890 |
| 266. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6 | 690 |
| 267. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 268. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 269. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 270. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 271. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 272. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11 | 2045 |
| 273. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 890 |
| 274. | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 890 |
| 275. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 690 |
| 276. | Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 690 |
| 277. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 | 490 |
| 278. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 11 | 2045 |
| 279. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7 | 890 |
| 280. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6 | 690 |
| 281. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5 | 490 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----|------|
| 282. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 11 | 2045 |
| 283. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 890 |
| 284. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 890 |
| 285. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 6 | 690 |
| 286. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 6 | 690 |
| 287. | Kepala Bidang Pemerintahan Desa | Bidang Pemerintahan Desa | 11 | 2045 |
| 288. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemerintahan Desa | 7 | 890 |
| 289. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pemerintahan Desa | 7 | 890 |
| 290. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemerintahan Desa | 6 | 690 |
| VI. DINAS PARIWISATA | | | | |
| 291. | Kepala Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | 14 | 2865 |
| 292. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Dinas Pariwisata | 10 | 1735 |
| 293. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Pariwisata | 10 | 1610 |
| 294. | Jf Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Dinas Pariwisata | 10 | 1610 |
| 295. | Jf Pamong Budaya Ahli Muda | Dinas Pariwisata | 9 | 1355 |
| 296. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Pariwisata | 8 | 1280 |
| 297. | Jf Pamong Budaya Ahli Pertama | Dinas Pariwisata | 8 | 1280 |
| 298. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Pariwisata | 8 | 1280 |
| 299. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Pariwisata | 8 | 1280 |
| 300. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Pariwisata | 6 | 740 |
| 301. | Sekretaris Dinas Pariwisata | Sekretariat Dinas Pariwisata | 12 | 2115 |
| 302. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Pariwisata | 7 | 890 |
| 303. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Pariwisata | 6 | 690 |
| 304. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 305. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 306. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 307. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 308. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 309. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |

| | | | | |
|--|---|--|----|------|
| 310. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 311. | Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | 11 | 2045 |
| 312. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | 7 | 890 |
| 313. | Penata Layanan Operasional | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | 7 | 890 |
| 314. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | 6 | 690 |
| 315. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | 5 | 490 |
| 316. | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata | Bidang Pemasaran Pariwisata | 11 | 2045 |
| 317. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemasaran Pariwisata | 7 | 890 |
| 318. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pemasaran Pariwisata | 7 | 890 |
| 319. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemasaran Pariwisata | 6 | 690 |
| 320. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Pemasaran Pariwisata | 6 | 690 |
| 321. | Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 11 | 2045 |
| 322. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 7 | 890 |
| 323. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 7 | 890 |
| 324. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 6 | 690 |
| 325. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 6 | 690 |
| 326. | Kepala Bidang Kebudayaan | Bidang Kebudayaan | 11 | 2045 |
| 327. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Kebudayaan | 7 | 890 |
| 328. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Kebudayaan | 6 | 690 |
| VII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| 329. | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 14 | 2865 |
| 330. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 | 1610 |
| 331. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 | 1735 |
| 332. | Jf Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9 | 1490 |

| | | | | |
|------|---|--|----|------|
| 333. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9 | 1355 |
| 334. | Jf Pranata Komputer Ahli Muda | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9 | 1355 |
| 335. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 336. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 337. | Jf Statistisi Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 338. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 339. | Jf Statistisi Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 340. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 341. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 342. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 1280 |
| 343. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/Terampil | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 | 740 |
| 344. | Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 | 2115 |
| 345. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 | 890 |
| 346. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 | 690 |
| 347. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika | 6 | 690 |
| 348. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 349. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 350. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 351. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 352. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 353. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 354. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 355. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 11 | 2045 |
| 356. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 7 | 890 |
| 357. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 6 | 690 |
| 358. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | 5 | 490 |

| | | | | |
|---|---|--|----|------|
| 359. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 5 | 490 |
| 360. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | 11 | 2045 |
| 361. | Penata Layanan Operasional | Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | 7 | 890 |
| 362. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | 7 | 890 |
| 363. | Pengendali Konten Internet | Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | 7 | 890 |
| 364. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | 6 | 690 |
| 365. | Kepala Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian, dan Keamanan Informasi | Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian, dan Keamanan Informasi | 9 | 1430 |
| 366. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian, dan Keamanan Informasi | 7 | 890 |
| 367. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian, dan Keamanan Informasi | 6 | 690 |
| 368. | Operator Layanan Operasional | Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian, dan Keamanan Informasi | 5 | 490 |
| 369. | Kepala Bidang Data dan Statistik | Bidang Data dan Statistik | 11 | 2045 |
| 370. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Data dan Statistik | 7 | 890 |
| 371. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Data dan Statistik | 6 | 690 |
| 372. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Data dan Statistik | 5 | 490 |
| VIII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | |
| 373. | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14 | 2865 |
| 374. | Jf Analis Kebijakan Ahli Madya | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 11 | 2135 |
| 375. | Jf Penata Perizinan Ahli Madya | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 11 | 1865 |

| | | | | |
|------|---|--|----|------|
| 376. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 10 | 1610 |
| 377. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 10 | 1735 |
| 378. | Jf Penata Perizinan Ahli Muda | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 10 | 1610 |
| 379. | Jf Arsiparis Muda / Ahli Muda | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 | 1355 |
| 380. | Jf Penata Perizinan Ahli Pertama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8 | 1280 |
| 381. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8 | 1280 |
| 382. | Jf Pranata Humas Ahli pertama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8 | 1280 |
| 383. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8 | 1280 |
| 384. | Penelaah Teknis Kebijakan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 890 |
| 385. | Pengolah Data dan Informasi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 690 |
| 386. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 | 2115 |
| 387. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 890 |
| 388. | Penata Layanan Operasional | Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 890 |
| 389. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 690 |
| 390. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 391. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 392. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 393. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 394. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|----|------|
| 395. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 396. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| IX. DINAS TENAGA KERJA | | | | |
| 397. | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | 14 | 2865 |
| 398. | Jf Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya | Dinas Tenaga Kerja | 12 | 2170 |
| 399. | Jf Pengantar Kerja Ahli Muda | Dinas Tenaga Kerja | 10 | 1610 |
| 400. | Jf Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda | Dinas Tenaga Kerja | 10 | 1610 |
| 401. | Jf Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama | Dinas Tenaga Kerja | 8 | 1280 |
| 402. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Tenaga Kerja | 8 | 1280 |
| 403. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Tenaga Kerja | 8 | 1280 |
| 404. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja | Sekretariat Dinas Tenaga Kerja | 11 | 2115 |
| 405. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 9 | 1430 |
| 406. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 7 | 890 |
| 407. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 6 | 690 |
| 408. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 409. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 410. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 411. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 412. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 413. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 414. | Kepala Bidang Hubungan Industrial | Bidang Hubungan Industrial | 11 | 2045 |
| 415. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Hubungan Industrial | 7 | 890 |
| 416. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Hubungan Industrial | 6 | 690 |

| | | | | |
|--|---|--|----|------|
| 417. | Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | 11 | 2045 |
| 418. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | 7 | 890 |
| 419. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | 6 | 690 |
| X. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | |
| 420. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14 | 2865 |
| 421. | Jf Pustakawan Ahli Madya | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11 | 1930 |
| 422. | Jf Arsiparis Ahli Madya | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11 | 1930 |
| 423. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 | 1610 |
| 424. | Jf Pustakawan Ahli Muda | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 1355 |
| 425. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 1355 |
| 426. | Jf Pustakawan Ahli Pertama | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 1280 |
| 427. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 1280 |
| 428. | Jf Arsiparis Penyelia | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 1230 |
| 429. | Jf Pranata Humas Ahli pertama | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 1280 |
| 430. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 1280 |
| 431. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 1280 |
| 432. | Jf Pustakawan Mahir | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7 | 890 |
| 433. | Jf Arsiparis Mahir/ pelaksana lanjutan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7 | 1005 |
| 434. | Jf Pustakawan Terampil/ pelaksana | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 740 |
| 435. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 740 |
| 436. | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 | 2115 |
| 437. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7 | 890 |
| 438. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 690 |
| 439. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|----|------|
| 440. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 441. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 442. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 443. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 444. | Kepala Bidang Perpustakaan | Bidang Perpustakaan | 11 | 2045 |
| 445. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perpustakaan | 7 | 890 |
| 446. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perpustakaan | 6 | 690 |
| 447. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Perpustakaan | 5 | 490 |
| 448. | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip | Bidang Pengelolaan Arsip | 11 | 2045 |
| 449. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengelolaan Arsip | 7 | 890 |
| 450. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengelolaan Arsip | 6 | 690 |
| 451. | Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Arsip | Bidang Pembinaan dan Perlindungan Arsip | 11 | 2045 |
| 452. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pembinaan dan Perlindungan Arsip | 7 | 890 |
| 453. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pembinaan dan Perlindungan Arsip | 7 | 890 |
| 454. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pembinaan dan Perlindungan Arsip | 6 | 690 |
| XI. DINAS KESEHATAN | | | | |
| 455. | Kepala Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | 14 | 2865 |
| 456. | Jf Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Dinas Kesehatan | 10 | 1750 |
| 457. | Jf Epidemiolog Kesehatan Muda | Dinas Kesehatan | 9 | 1555 |
| 458. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda | Dinas Kesehatan | 9 | 1385 |
| 459. | Jf Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda | Dinas Kesehatan | 9 | 1370 |
| 460. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | Dinas Kesehatan | 9 | 1355 |
| 461. | Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda | Dinas Kesehatan | 9 | 1355 |

| | | | | |
|------|---|--|----|------|
| 462. | Jf Nutrisisionis Ahli Muda | Dinas Kesehatan | 9 | 1555 |
| 463. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 464. | Jf Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 465. | Jf Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 466. | Jf Nutrisisionis Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 467. | Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 468. | Jf Apoteker Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 469. | Jf Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 470. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku /Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1310 |
| 471. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 472. | Jf Nutrisisionis Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 473. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 474. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 475. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Kesehatan | 8 | 1280 |
| 476. | Jf Asisten Apoteker Penyelia | Dinas Kesehatan | 8 | 1245 |
| 477. | Jf Asisten Apoteker Mahir/ pelaksana lanjutan | Dinas Kesehatan | 7 | 1020 |
| 478. | Jf Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir/ pelaksana lanjutan | Dinas Kesehatan | 7 | 1020 |
| 479. | Jf Teknisi Elektromedis Mahir | Dinas Kesehatan | 7 | 1035 |
| 480. | Jf Asisten Apoteker Terampil/ pelaksana | Dinas Kesehatan | 6 | 755 |
| 481. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil | Dinas Kesehatan | 6 | 740 |
| 482. | Sekretaris Dinas Kesehatan | Sekretariat Dinas Kesehatan | 12 | 2115 |
| 483. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Kesehatan | 7 | 890 |
| 484. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Kesehatan | 6 | 690 |
| 485. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 486. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 487. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 488. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|----|------|
| 489. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 490. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 491. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 492. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 493. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Bidang Kesehatan Masyarakat | 11 | 2045 |
| 494. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Kesehatan Masyarakat | 7 | 890 |
| 495. | Penata Kelola Layanan Kesehatan | Bidang Kesehatan Masyarakat | 7 | 890 |
| 496. | Pengelola Layanan Kesehatan | Bidang Kesehatan Masyarakat | 6 | 690 |
| 497. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Kesehatan Masyarakat | 6 | 690 |
| 498. | Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan | Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan | 11 | 2045 |
| 499. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan | 7 | 890 |
| 500. | Pengelola Layanan Kesehatan | Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan | 6 | 690 |
| 501. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan | 6 | 690 |
| 502. | Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana | Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana | 11 | 2045 |
| 503. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana | 7 | 890 |
| 504. | Pengelola Layanan Kesehatan | Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana | 6 | 690 |
| 505. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana | 6 | 690 |
| UPT PUSKESMAS BATU | | | | |
| 506. | Jf Dokter Gigi Ahli Madya | Puskesmas Batu | 12 | 2225 |

| | | | | |
|------|--|----------------|----|------|
| 507. | Jf Dokter Ahli Madya | Puskesmas Batu | 12 | 2225 |
| 508. | Jf Perawat Ahli Madya | Puskesmas Batu | 11 | 1960 |
| 509. | Jf Dokter Gigi ahli Muda | Puskesmas Batu | 10 | 1670 |
| 510. | Jf Dokter Ahli Muda | Puskesmas Batu | 10 | 1720 |
| 511. | Jf Apoteker Ahli Muda | Puskesmas Batu | 9 | 1370 |
| 512. | Jf Nutrisionis ahli Muda | Puskesmas Batu | 9 | 1555 |
| 513. | Jf Bidan Ahli Muda | Puskesmas Batu | 9 | 1355 |
| 514. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda | Puskesmas Batu | 9 | 1355 |
| 515. | Jf Bidan Ahli Muda | Puskesmas Batu | 9 | 1355 |
| 516. | Jf Dokter ahli Pertama | Puskesmas Batu | 9 | 1570 |
| 517. | Jf Dokter Gigi Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 9 | 1370 |
| 518. | Jf Dokter ahli Pertama | Puskesmas Batu | 9 | 1570 |
| 519. | Jf Psikolog Klinis Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 520. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku / Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 521. | Jf Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 522. | Jf Apoteker Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 523. | Jf Bidan Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 524. | Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 525. | Jf Nutrisionis ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 526. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 527. | Jf Bidan Penyelia | Puskesmas Batu | 8 | 1280 |
| 528. | Jf Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | Puskesmas Batu | 8 | 1260 |
| 529. | Jf Perawat Penyelia | Puskesmas Batu | 8 | 1260 |
| 530. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | Puskesmas Batu | 8 | 1230 |
| 531. | Jf Asisten Apoteker Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Batu | 7 | 1020 |
| 532. | Jf Bidan Mahir/ pelaksana lanjutan | Puskesmas Batu | 7 | 1005 |
| 533. | Jf Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Mahir | Puskesmas Batu | 7 | 1035 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----|------|
| 534. | Jf Perawat Mahir / Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Batu | 7 | 1035 |
| 535. | Jf Perekam Medis Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Batu | 7 | 1035 |
| 536. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Batu | 7 | 1005 |
| 537. | Jf Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Batu | 7 | 1020 |
| 538. | Jf Bidan Pelaksana/ Terampil | Puskesmas Batu | 6 | 740 |
| 539. | Jf Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Terampil | Puskesmas Batu | 6 | 770 |
| 540. | Jf Perawat Terampil | Puskesmas Batu | 6 | 770 |
| 541. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | Puskesmas Batu | 6 | 740 |
| 542. | Jf Teknisi Elektromedis Terampil | Puskesmas Batu | 6 | 770 |
| 543. | Jf Perekam Medis Terampil | Puskesmas Batu | 6 | 770 |
| 544. | Pengolah Data dan Informasi | Puskesmas Batu | 6 | 690 |
| 545. | Pengadministrasi Perkantoran | Puskesmas Batu | 5 | 490 |
| 546. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Batu | 4 | 440 |
| 547. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Batu | 3 | 340 |
| UPT PUSKESMAS SISIR | | | | |
| 548. | Jf Dokter Gigi Ahli Madya | Puskesmas Sisir | 12 | 2225 |
| 549. | Jf Dokter Ahli Madya | Puskesmas Sisir | 12 | 2225 |
| 550. | Jf Perawat Ahli Muda | Puskesmas Sisir | 9 | 1385 |
| 551. | Jf Apoteker Ahli Muda | Puskesmas Sisir | 9 | 1370 |
| 552. | Jf Dokter ahli Pertama | Puskesmas Sisir | 9 | 1570 |
| 553. | Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Sisir | 8 | 1280 |
| 554. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku / Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Puskesmas Sisir | 8 | 1280 |
| 555. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Puskesmas Sisir | 8 | 1280 |
| 556. | Jf Nutrisisionis ahli Pertama | Puskesmas Sisir | 8 | 1280 |
| 557. | Jf Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Penyelia | Puskesmas Sisir | 8 | 1245 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|----|------|
| 558. | Jf Perawat Penyelia | Puskesmas Sisir | 8 | 1260 |
| 559. | Jf Bidan Penyelia | Puskesmas Sisir | 8 | 1280 |
| 560. | Jf Asisten Apoteker Penyelia | Puskesmas Sisir | 8 | 1245 |
| 561. | Jf Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Sisir | 7 | 1020 |
| 562. | Jf Perawat Pelaksana Lanjutan/ Mahir | Puskesmas Sisir | 7 | 1035 |
| 563. | Jf Bidan Pelaksana Lanjutan Mahir | Puskesmas Sisir | 7 | 1005 |
| 564. | Jf Asisten Apoteker Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Sisir | 7 | 1020 |
| 565. | Jf Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ Mahir | Puskesmas Sisir | 7 | 1005 |
| 566. | Jf Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Sisir | 7 | 1035 |
| 567. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Sisir | 7 | 1005 |
| 568. | Jf Perawat Pelaksana/ Terampil | Puskesmas Sisir | 6 | 770 |
| 569. | Jf Bidan Pelaksana/ Terampil | Puskesmas Sisir | 6 | 740 |
| 570. | Jf Perekam Medis Pelaksana/ Terampil | Puskesmas Sisir | 6 | 770 |
| 571. | Jf Perawat Gigi /Terapis Gigi dan Mulut Terampil | Puskesmas Sisir | 6 | 770 |
| 572. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Sisir | 6 | 740 |
| 573. | Pengolah Data dan Informasi | Puskesmas Sisir | 6 | 690 |
| 574. | Pengadministrasi Perkantoran | Puskesmas Sisir | 5 | 490 |
| 575. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Sisir | 4 | 440 |
| 576. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Sisir | 3 | 340 |
| UPT PUSKESMAS BUMIAJI | | | | |
| 577. | Jf Dokter Ahli Madya | Puskesmas Bumiaji | 12 | 2225 |
| 578. | Jf Perawat Ahli Madya | Puskesmas Bumiaji | 11 | 1960 |
| 579. | Jf Dokter Gigi ahli Muda | Puskesmas Bumiaji | 10 | 1670 |
| 580. | Jf Dokter Ahli Muda | Puskesmas Bumiaji | 10 | 1720 |
| 581. | Jf Perawat Ahli Muda | Puskesmas Bumiaji | 9 | 1385 |
| 582. | Jf Apoteker Ahli Muda | Puskesmas Bumiaji | 9 | 1370 |

| | | | | |
|------|--|-------------------|---|------|
| 583. | Jf Dokter Gigi Ahli Pertama | Puskesmas Bumiaji | 9 | 1370 |
| 584. | Jf Apoteker Ahli Pertama | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1280 |
| 585. | Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1280 |
| 586. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku / Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1280 |
| 587. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1280 |
| 588. | Jf Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1280 |
| 589. | Jf Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1245 |
| 590. | Jf Perawat Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1260 |
| 591. | Jf Bidan Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1280 |
| 592. | Jf Asisten Apoteker Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1245 |
| 593. | Jf Nutrisionis Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1230 |
| 594. | Jf Perekam Medis Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1260 |
| 595. | Jf Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | Puskesmas Bumiaji | 8 | 1260 |
| 596. | Jf Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1020 |
| 597. | Jf Perawat Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1035 |
| 598. | Jf Bidan Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1005 |
| 599. | Jf Asisten Apoteker Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1020 |
| 600. | Jf Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ Mahir | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1005 |
| 601. | Jf Perekam Medis Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1035 |
| 602. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Bumiaji | 7 | 1005 |
| 603. | Jf Perawat Terampil / Pelaksana | Puskesmas Bumiaji | 6 | 770 |
| 604. | Jf Bidan Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Bumiaji | 6 | 740 |
| 605. | Jf Nutrisionis Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Bumiaji | 6 | 740 |
| 606. | Jf Tenaga Sanitasi lingkungan/ Sanitarian terampil/ pelaksana | Puskesmas Bumiaji | 6 | 755 |
| 607. | Jf Teknisi Elektromedis Terampil/ pelaksana | Puskesmas Bumiaji | 6 | 770 |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|----|------|
| 608. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Bumiaji | 6 | 740 |
| 609. | Pengolah Data dan Informasi | Puskesmas Bumiaji | 6 | 690 |
| 610. | Pengadministrasi Perkantoran | Puskesmas Bumiaji | 5 | 490 |
| 611. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Bumiaji | 4 | 440 |
| 612. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Bumiaji | 3 | 340 |
| UPT PUSKESMAS BEJI | | | | |
| 613. | Jf Dokter Gigi Ahli Madya | Puskesmas Beji | 12 | 2225 |
| 614. | Jf Dokter Ahli Madya | Puskesmas Beji | 12 | 2225 |
| 615. | Jf Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian Ahli Madya | Puskesmas Beji | 11 | 1930 |
| 616. | Jf Dokter Ahli Muda | Puskesmas Beji | 10 | 1720 |
| 617. | Jf Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian Ahli Muda | Puskesmas Beji | 9 | 1370 |
| 618. | Jf Perawat Ahli Muda | Puskesmas Beji | 9 | 1385 |
| 619. | Jf Apoteker Ahli Muda | Puskesmas Beji | 9 | 1370 |
| 620. | Jf Dokter Gigi Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 9 | 1370 |
| 621. | Jf Dokter ahli Pertama | Puskesmas Beji | 9 | 1570 |
| 622. | Jf Bidan Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 623. | Jf Apoteker Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 624. | Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 625. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 626. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 627. | Jf Nutrisisionis ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 628. | Jf Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 629. | Jf Perawat Penyelia | Puskesmas Beji | 8 | 1260 |
| 630. | Jf Bidan Penyelia | Puskesmas Beji | 8 | 1280 |
| 631. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | Puskesmas Beji | 8 | 1230 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|----|------|
| 632. | Jf Perawat Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Beji | 7 | 1035 |
| 633. | Jf Bidan Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Beji | 7 | 1005 |
| 634. | Jf Asisten Apoteker Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Beji | 7 | 1020 |
| 635. | Jf Perekam Medis Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Beji | 7 | 1035 |
| 636. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Beji | 7 | 1005 |
| 637. | Jf Perawat Terampil / Pelaksana | Puskesmas Beji | 6 | 770 |
| 638. | Jf Bidan Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Beji | 6 | 740 |
| 639. | Jf Nutrisisionis Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Beji | 6 | 740 |
| 640. | Jf Perawat Gigi /Terapis Gigi dan Mulut Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Beji | 6 | 770 |
| 641. | Pengolah Data dan Informasi | Puskesmas Beji | 6 | 690 |
| 642. | Pengadministrasi Perkantoran | Puskesmas Beji | 5 | 490 |
| 643. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Beji | 4 | 440 |
| 644. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Beji | 3 | 340 |
| UPT PUSKESMAS JUNREJO | | | | |
| 645. | Jf Dokter Gigi Ahli Madya | Puskesmas Junrejo | 12 | 2225 |
| 646. | Jf Dokter Ahli Madya | Puskesmas Junrejo | 12 | 2225 |
| 647. | Jf Perawat Ahli Madya | Puskesmas Junrejo | 11 | 1960 |
| 648. | Jf Dokter Gigi ahli Muda | Puskesmas Junrejo | 10 | 1670 |
| 649. | Jf Dokter Ahli Muda | Puskesmas Junrejo | 10 | 1720 |
| 650. | Jf Apoteker Ahli Muda | Puskesmas Junrejo | 9 | 1370 |
| 651. | Jf Dokter ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 9 | 1570 |
| 652. | Jf Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |
| 653. | Jf Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |
| 654. | Jf Apoteker Ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |
| 655. | Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |
| 656. | Jf Nutrisisionis ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |

| | | | | |
|---|---|---|----|------|
| 657. | Jf Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |
| 658. | Jf Perawat Penyelia | Puskesmas Junrejo | 8 | 1260 |
| 659. | Jf Bidan Penyelia | Puskesmas Junrejo | 8 | 1280 |
| 660. | Jf Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Junrejo | 7 | 1020 |
| 661. | Jf Bidan Mahir/ pelaksana lanjutan | Puskesmas Junrejo | 7 | 1005 |
| 662. | Jf Perawat Gigi /Terapis Gigi dan Mulut Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Junrejo | 7 | 1035 |
| 663. | Jf Perawat Mahir/ Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Junrejo | 7 | 1035 |
| 664. | Jf Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Puskesmas Junrejo | 7 | 1005 |
| 665. | Jf Perawat Terampil / Pelaksana | Puskesmas Junrejo | 6 | 770 |
| 666. | Jf Bidan Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Junrejo | 6 | 740 |
| 667. | Jf Nutrisionis Terampil/ Pelaksana | Puskesmas Junrejo | 6 | 740 |
| 668. | Jf Perekam Medis Pelaksana/ Terampil | Puskesmas Junrejo | 6 | 770 |
| 669. | Pengolah Data dan Informasi | Puskesmas Junrejo | 6 | 690 |
| 670. | Pengadministrasi Perkantoran | Puskesmas Junrejo | 5 | 490 |
| 671. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Junrejo | 4 | 440 |
| 672. | Operator Layanan Operasional | Puskesmas Junrejo | 3 | 340 |
| XII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 673. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 14 | 2865 |
| 674. | Jf Penata Ruang Ahli Madya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11 | 2330 |
| 675. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | 1610 |
| 676. | Jf Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | 1610 |
| 677. | Jf Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | 1610 |
| 678. | Jf Penata Ruang Ahli Muda | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | 1355 |
| 679. | Jf Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 1280 |
| 680. | Jf Teknik Pengairan Ahli | Dinas Pekerjaan | 8 | 1280 |

| | | | | |
|------|---|---|----|------|
| | Pertama | Umum dan Penataan Ruang | | |
| 681. | Jf Penata Ruang Ahli Pertama | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 1280 |
| 682. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 1280 |
| 683. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 1280 |
| 684. | Jf Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 1280 |
| 685. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | 740 |
| 686. | Jf Penata Laksana Jalan Dan Jembatan Terampil | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | 685 |
| 687. | Jf Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | 520 |
| 688. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12 | 2115 |
| 689. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 890 |
| 690. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | 690 |
| 691. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | 490 |
| 692. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 693. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 694. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 695. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 696. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 697. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 698. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 699. | Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 11 | 2045 |

| | | | | |
|---|---|---|----|------|
| 700. | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 7 | 890 |
| 701. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 7 | 890 |
| 702. | Operator Pengelolaan Sumber Daya Air | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 6 | 690 |
| 703. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 6 | 690 |
| 704. | Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 6 | 690 |
| 705. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 6 | 690 |
| 706. | Operator Layanan Operasional | Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi | 5 | 490 |
| 707. | Kepala Bidang Bina Marga | Bidang Bina Marga | 11 | 2045 |
| 708. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Bina Marga | 7 | 890 |
| 709. | Pengawas Jaringan Utilitas | Bidang Bina Marga | 7 | 890 |
| 710. | Teknisi Sarana Prasarana | Bidang Bina Marga | 7 | 890 |
| 711. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Bina Marga | 6 | 690 |
| 712. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Bina Marga | 6 | 690 |
| 713. | Operator Alat Berat | Bidang Bina Marga | 5 | 490 |
| 714. | Operator Layanan Operasional | Bidang Bina Marga | 5 | 490 |
| 715. | Kepala Bidang Penataan Ruang | Bidang Tata Ruang | 11 | 2045 |
| 716. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Tata Ruang | 7 | 890 |
| 717. | Pengawas Jaringan Utilitas | Bidang Tata Ruang | 7 | 890 |
| 718. | Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang | Bidang Tata Ruang | 6 | 690 |
| 719. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Tata Ruang | 6 | 690 |
| 720. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Tata Ruang | 6 | 690 |
| 721. | Operator Layanan Operasional | Bidang Tata Ruang | 5 | 490 |
| XIII. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 722. | Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 14 | 2865 |
| 723. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10 | 1610 |
| 724. | Jf Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10 | 1610 |

| | | | | |
|------|--|--|----|------|
| 725. | Jf Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10 | 1610 |
| 726. | Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10 | 1610 |
| 727. | Jf Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 728. | Jf Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 729. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 730. | Jf Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 731. | Jf Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 732. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 733. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 | 1280 |
| 734. | Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 12 | 2115 |
| 735. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 7 | 890 |
| 736. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6 | 690 |
| 737. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 738. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 739. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 740. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 741. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 742. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 743. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 744. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 745. | Kepala Bidang Perumahan | Bidang Perumahan | 11 | 2045 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|----|------|
| 746. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perumahan | 7 | 890 |
| 747. | Penata Layanan Operasional | Bidang Perumahan | 7 | 890 |
| 748. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perumahan | 7 | 890 |
| 749. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perumahan | 6 | 690 |
| 750. | Kepala Seksi Pertanahan dan Permakaman | Seksi Pertanahan dan Permakaman | 9 | 1430 |
| 751. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pertanahan dan Permakaman | 7 | 890 |
| 752. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pertanahan dan Permakaman | 6 | 690 |
| 753. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pertanahan dan Permakaman | 6 | 690 |
| 754. | Kepala Bidang Cipta Karya | Bidang Cipta Karya | 11 | 2045 |
| 755. | Penata Layanan Operasional | Bidang Cipta Karya | 7 | 890 |
| 756. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Cipta Karya | 7 | 890 |
| 757. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Cipta Karya | 6 | 690 |
| 758. | Kepala Bidang Bina Konstruksi | Bidang Bina Konstruksi | 11 | |
| 759. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Bina Konstruksi | 7 | 890 |
| 760. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Bina Konstruksi | 6 | 690 |
| 761. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Bina Konstruksi | 6 | 690 |
| 762. | Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | 8 | 1295 |
| 763. | Pengolah Data dan Informasi | UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | 6 | 690 |
| 764. | Pengelola Layanan Operasional | UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | 6 | 690 |
| 765. | Pengadministrasi Perkantoran | UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | 5 | 490 |
| 766. | Operator Layanan Operasional | UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | 3 | 340 |
| XIV. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| 767. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | 14 | 2865 |
| 768. | Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup | 10 | 1735 |
| 769. | Jf Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup | 10 | 1610 |
| 770. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup | 10 | 1610 |
| 771. | Jf Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup | 9 | 1520 |
| 772. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup | 9 | 1355 |

| | | | | |
|------|--|---|----|------|
| 773. | Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 1280 |
| 774. | Jf Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 1280 |
| 775. | Jf Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 1280 |
| 776. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 1280 |
| 777. | Jf Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 1005 |
| 778. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Lingkungan Hidup | 6 | 740 |
| 779. | Jf Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 520 |
| 780. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup | 12 | 2115 |
| 781. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 890 |
| 782. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup | 6 | 690 |
| 783. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 784. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 785. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 786. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 787. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 788. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 789. | Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan | Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan | 11 | 2045 |
| 790. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan | 7 | 890 |
| 791. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan | 6 | 690 |
| 792. | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | 11 | 2045 |
| 793. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | 7 | 890 |

| | | | | |
|------|--|---|----|------|
| 794. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | 7 | 890 |
| 795. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | 6 | 690 |
| 796. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | 3 | 340 |
| 797. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan | 1 | 190 |
| 798. | Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 11 | 2045 |
| 799. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 7 | 890 |
| 800. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 7 | 890 |
| 801. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 6 | 690 |
| 802. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 6 | 690 |
| 803. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 5 | 490 |
| 804. | Operator Alat Berat | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 5 | 490 |

| | | | | |
|--|---|---|----|------|
| 805. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 3 | 340 |
| 806. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 1 | 190 |
| 807. | Pengelola Umum Operasional | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 1 | 190 |
| XV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| 808. | Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14 | 2865 |
| 809. | Jf Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | 1385 |
| 810. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | 1355 |
| 811. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 1280 |
| 812. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 1280 |
| 813. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 1280 |
| 814. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 1280 |
| 815. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 1280 |
| 816. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/Terampil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | 740 |
| 817. | Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 | 2115 |
| 818. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 | 1430 |
| 819. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 7 | 890 |
| 820. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 6 | 690 |
| 821. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 6 | 690 |
| 822. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 823. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|----|------|
| 824. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 825. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 826. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 827. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 11 | 2045 |
| 828. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 7 | 890 |
| 829. | Penata Layanan Operasional | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 7 | 890 |
| 830. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 6 | 690 |
| 831. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 11 | 2045 |
| 832. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 7 | 890 |
| 833. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 6 | 690 |
| 834. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 5 | 490 |
| 835. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 11 | 2045 |
| 836. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 7 | 890 |
| 837. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 6 | 690 |
| XVI. DINAS PERHUBUNGAN | | | | |
| 838. | Kepala Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | 14 | 2865 |
| 839. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Perhubungan | 10 | 1610 |
| 840. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Perhubungan | 8 | 1280 |
| 841. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Perhubungan | 8 | 1280 |
| 842. | Sekretaris Dinas Perhubungan | Sekretariat Dinas Perhubungan | 12 | 2115 |
| 843. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Perhubungan | 7 | 890 |
| 844. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Perhubungan | 6 | 690 |
| 845. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 846. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 847. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |

| | | | | |
|------|---|--|----|------|
| 848. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 849. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 850. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 851. | Kepala Bidang Lalu lintas | Bidang Lalu lintas | 11 | 2045 |
| 852. | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana | Seksi Sarana dan Prasarana | 9 | 1430 |
| 853. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Sarana dan Prasarana | 7 | 890 |
| 854. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Sarana dan Prasarana | 6 | 690 |
| 855. | Operator Layanan Operasional | Seksi Sarana dan Prasarana | 5 | 490 |
| 856. | Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi | Seksi Pengendalian dan Operasi | 9 | 1430 |
| 857. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pengendalian dan Operasi | 7 | 890 |
| 858. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pengendalian dan Operasi | 6 | 690 |
| 859. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pengendalian dan Operasi | 6 | 690 |
| 860. | Kepala Bidang Angkutan | Bidang Angkutan | 11 | 2045 |
| 861. | Kepala Seksi Tata Kelola Angkutan Jalan | Seksi Tata Kelola Angkutan Jalan | 9 | 1430 |
| 862. | Penata Layanan Operasional | Seksi Tata Kelola Angkutan Jalan | 7 | 890 |
| 863. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Tata Kelola Angkutan Jalan | 6 | 690 |
| 864. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Tata Kelola Angkutan Jalan | 6 | 690 |
| 865. | Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan | Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan | 9 | 1430 |
| 866. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan | 7 | 890 |
| 867. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan | 7 | 890 |
| 868. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan | 6 | 690 |
| 869. | Pengadministrasi Perkantoran | Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan | 5 | 490 |
| 870. | Kepala Bidang Perparkiran | Bidang Perparkiran | 11 | 2045 |
| 871. | Kepala Seksi Tata Kelola Perparkiran | Seksi Tata Kelola Perparkiran | 9 | 1430 |
| 872. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Tata Kelola Perparkiran | 7 | 890 |

| | | | | |
|--|--|---|----|------|
| 873. | Penata Layanan Operasional | Seksi Tata Kelola Perparkiran | 7 | 890 |
| 874. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Tata Kelola Perparkiran | 6 | 690 |
| 875. | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran | Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran | 9 | 1430 |
| 876. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran | 7 | 890 |
| 877. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran | 6 | 690 |
| 878. | Operator Layanan Operasional | Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran | 5 | 490 |
| 879. | Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 8 | 1295 |
| 880. | Pengelola Layanan Operasional | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 6 | 690 |
| 881. | Pengadministrasi Perkantoran | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 5 | 490 |
| 882. | JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 8 | 1260 |
| 883. | JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/ Mahir | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 7 | 1035 |
| 884. | JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/ Terampil | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 6 | 770 |
| 885. | JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 5 | 490 |
| XVII. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN | | | | |
| 886. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 14 | 2865 |
| 887. | Jf Pengembang Kewirausahaan ahli Madya | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 12 | 2310 |
| 888. | Jf Pengawas K metrologian ahli Madya | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 11 | 1930 |
| 889. | Jf Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 10 | 1685 |
| 890. | Jf Pengawas Koperasi Ahli Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 10 | 1610 |
| 891. | Jf Analis Perdagangan Ahli Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 10 | 1610 |
| 892. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 10 | 1610 |

| | | | | |
|------|--|---|---|------|
| 893. | Jf Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 9 | 1385 |
| 894. | Jf Pengawas Kemetrolgian Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 9 | 1555 |
| 895. | Jf Penera Ahli Muda | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 9 | 1555 |
| 896. | Jf Pengawas Kemetrolgian Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 897. | Jf Penera Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 898. | Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 899. | Jf Analis Perdagangan Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 900. | Jf Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 901. | Jf Penera Penyelia | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1230 |
| 902. | Jf Pengawas Perdagangan Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 903. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 904. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 905. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 906. | Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 907. | Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 8 | 1280 |
| 908. | Jf Penera Mahir | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 7 | 1005 |
| 909. | Jf Penera Terampil | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 6 | 740 |
| 910. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 6 | 740 |
| 911. | Jf Pengamat Tera Pemula | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, | 5 | 490 |

| | | | | |
|------|--|---|----|------|
| | | dan Perdagangan | | |
| 912. | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 12 | 2115 |
| 913. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 7 | 890 |
| 914. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 6 | 690 |
| 915. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan | 5 | 490 |
| 916. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 917. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 918. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 919. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 920. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 921. | Kepala Bidang Koperasi | Bidang Koperasi | 11 | 2045 |
| 922. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Koperasi | 7 | 890 |
| 923. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Koperasi | 6 | 690 |
| 924. | Kepala Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian | Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian | 11 | 2045 |
| 925. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian | 7 | 890 |
| 926. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian | 6 | 690 |
| 927. | Kepala Bidang Perdagangan | Bidang Perdagangan | 11 | 2045 |
| 928. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perdagangan | 7 | 890 |
| 929. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perdagangan | 6 | 690 |
| 930. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Perdagangan | 6 | 690 |
| 931. | Kepala UPT Pasar | UPT Pasar | 8 | |
| 932. | Pengolah Data dan Informasi | UPT Pasar | 6 | 690 |
| 933. | Pengadministrasi Perkantoran | UPT Pasar | 5 | 490 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|------|
| 934. | Operator Layanan Operasional | UPT Pasar | 3 | 340 |
| XVIII. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | |
| 935. | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 14 | 2865 |
| 936. | Jf Medik Veteriner Ahli Utama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 13 | 2485 |
| 937. | Jf Penyuluh Pertanian Ahli Madya | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 12 | 2240 |
| 938. | Jf Medik Veteriner Ahli Madya | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 11 | 1930 |
| 939. | Jf Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1610 |
| 940. | Jf Penyuluh Pertanian Ahli Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1775 |
| 941. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1735 |
| 942. | Jf Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1700 |
| 943. | Jf Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1750 |
| 944. | Jf Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1730 |
| 945. | Jf Analis Ketahanan Pangan Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 | 1735 |
| 946. | Jf Medik Veteriner Ahli Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 9 | 1355 |
| 947. | Jf Penyuluh Perikanan Ahli Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 9 | 1385 |
| 948. | Jf Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 9 | 1355 |
| 949. | Jf Pengawas Bibit Ternak Muda | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 9 | 1355 |
| 950. | Jf Penyuluh Pertanian Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1295 |
| 951. | Jf Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 952. | Jf Medik Veteriner Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 953. | Jf Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1220 |
| 954. | Jf Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 955. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 956. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 957. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 958. | Jf Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |

| | | | | |
|------|---|--|----|------|
| 959. | Jf Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1280 |
| 960. | Jf Penyuluh Pertanian Mahir | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 | 1245 |
| 961. | Jf Penyuluh Pertanian Terampil | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 7 | 1095 |
| 962. | Jf Arsiparis Terampil | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 6 | 740 |
| 963. | Jf Penyuluh Pertanian Pemula | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5 | 570 |
| 964. | Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Sekretariat Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 12 | 2115 |
| 965. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 7 | 890 |
| 966. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 6 | 690 |
| 967. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 5 | 490 |
| 968. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 969. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 970. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 971. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 972. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 973. | Kepala Bidang Prasarana Pertanian | Bidang Prasarana Pertanian | 11 | 2045 |
| 974. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Prasarana Pertanian | 7 | 890 |
| 975. | Penata Layanan Operasional | Bidang Prasarana Pertanian | 7 | 890 |
| 976. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Prasarana Pertanian | 6 | 690 |
| 977. | Kepala Bidang Pertanian | Bidang Pertanian | 11 | 2045 |
| 978. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pertanian | 7 | 890 |
| 979. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Pertanian | 6 | 690 |
| 980. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pertanian | 6 | 690 |
| 981. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pertanian | 5 | 490 |
| 982. | Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan | Bidang Peternakan dan Perikanan | 11 | 2045 |
| 983. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Peternakan dan Perikanan | 7 | 890 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|----|------|
| 984. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Peternakan dan Perikanan | 6 | 690 |
| 985. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Peternakan dan Perikanan | 6 | 690 |
| 986. | Operator Layanan Operasional | Bidang Peternakan dan Perikanan | 5 | 490 |
| 987. | Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian | Bidang Penyuluhan Pertanian | 11 | 2045 |
| 988. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Penyuluhan Pertanian | 7 | 890 |
| 989. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Penyuluhan Pertanian | 6 | 690 |
| 990. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Penyuluhan Pertanian | 6 | 690 |
| 991. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan | Bidang Ketahanan Pangan | 11 | 2045 |
| 992. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Ketahanan Pangan | 7 | 890 |
| 993. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Ketahanan Pangan | 6 | 690 |
| 994. | Pengelola Layanan Operasional | Bidang Ketahanan Pangan | 6 | 690 |
| XIX. DINAS SOSIAL | | | | |
| 995. | Kepala Dinas Sosial | Dinas Sosial | 14 | 2865 |
| 996. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Sosial | 10 | 1610 |
| 997. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Dinas Sosial | 9 | 1355 |
| 998. | Jf Pekerja Sosial Ahli Muda | Dinas Sosial | 9 | 1355 |
| 999. | Jf Penyuluh Sosial Ahli Muda | Dinas Sosial | 9 | 1385 |
| 1000. | Jf Penggerak Swadaya Sosial Ahli Pertama | Dinas Sosial | 8 | 1280 |
| 1001. | Jf Pekerja Sosial Pertama/ Ahli Pertama | Dinas Sosial | 8 | 1280 |
| 1002. | Jf Penyuluh Sosial Ahli Pertama | Dinas Sosial | 8 | 1310 |
| 1003. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Sosial | 8 | 1280 |
| 1004. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Sosial | 8 | 1280 |
| 1005. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Dinas Sosial | 8 | 1280 |
| 1006. | Sekretaris Dinas Sosial | Sekretariat Dinas Sosial | 12 | 2115 |
| 1007. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Sosial | 7 | 890 |
| 1008. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Sosial | 6 | 690 |
| 1009. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1010. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |

| | | | | |
|---|--|---|----|------|
| 1011. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1012. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1013. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 1014. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 1015. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1016. | Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | 11 | 2045 |
| 1017. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | 7 | 890 |
| 1018. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | 6 | 690 |
| 1019. | Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial | Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial | 11 | 2045 |
| 1020. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial | 7 | 890 |
| 1021. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial | 6 | 690 |
| XX. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | | |
| 1022. | Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 14 | 2865 |
| 1023. | Jf Analis Kebakaran Ahli Madya | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 11 | 1990 |
| 1024. | Jf Perencana Ahli Muda | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 10 | 1610 |
| 1025. | Jf Analis Kebakaran Ahli Muda | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 9 | 1495 |
| 1026. | Jf Analis Kebakaran Ahli Pertama | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 8 | 1280 |
| 1027. | Jf Pemadam Kebakaran Penyelia | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 8 | 1275 |
| 1028. | Jf Analis Kebakaran Ahli Pertama | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 8 | 1280 |
| 1029. | Jf Perencana Ahli Pertama | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 8 | 1280 |

| | | | | |
|-------|--|--|----|------|
| 1030. | Jf Pemadam Kebakaran Mahir | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 7 | 1000 |
| 1031. | Jf Pemadam Kebakaran Terampil | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 6 | 695 |
| 1032. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/Terampil | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 6 | 740 |
| 1033. | Jf Pemadam Kebakaran Pemula | Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 5 | 630 |
| 1034. | Sekretaris Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | Sekretariat Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | 12 | 2115 |
| 1035. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 7 | 890 |
| 1036. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 6 | 690 |
| 1037. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5 | 490 |
| 1038. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1039. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1040. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1041. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 1042. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1043. | Kepala Bidang Pencegahan | Bidang Pencegahan | 11 | 2045 |
| 1044. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pencegahan | 7 | 890 |
| 1045. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pencegahan | 6 | 690 |
| 1046. | Operator Layanan Operasional | Bidang Pencegahan | 5 | 490 |
| 1047. | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur | Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur | 9 | 1430 |
| 1048. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur | 7 | 890 |
| 1049. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur | 6 | 690 |
| 1050. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha | 9 | 1430 |
| 1051. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha | 7 | 890 |

| | | | | |
|--|---|--|----|------|
| 1052. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha | 7 | 890 |
| 1053. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha | 6 | 690 |
| 1054. | Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana | Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana | 11 | 2045 |
| 1055. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana | 7 | 890 |
| 1056. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana | 6 | 690 |
| 1057. | Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran | Seksi Pemadaman Kebakaran | 9 | 1430 |
| 1058. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemadaman Kebakaran | 7 | 890 |
| 1059. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pemadaman Kebakaran | 6 | 690 |
| 1060. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemadaman Kebakaran | 6 | 690 |
| 1061. | Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data | Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data | 9 | 1430 |
| 1062. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data | 7 | 890 |
| 1063. | Teknisi Sarana Prasarana | Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data | 7 | 890 |
| 1064. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data | 6 | 690 |
| 1065. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data | 6 | 690 |
| XXI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | |
| 1066. | Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja | Satuan Polisi Pamong Praja | 14 | 2865 |
| 1067. | Jf Polisi Pamong Praja Ahli Madya | Satuan Polisi Pamong Praja | 11 | 2085 |
| 1068. | Jf Perencana Muda | Satuan Polisi Pamong Praja | 10 | 1610 |
| 1069. | Jf Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda | Satuan Polisi Pamong Praja | 9 | 1480 |
| 1070. | Jf Polisi Pamong Praja Ahli Muda | Satuan Polisi Pamong Praja | 9 | 1445 |
| 1071. | Jf Polisi Pamong Praja Ahli Pertama | Satuan Polisi Pamong Praja | 8 | 1280 |
| 1072. | Jf Polisi Pamong Praja Penyelia | Satuan Polisi Pamong Praja | 8 | 1320 |
| 1073. | JF Arsiparis Ahli Pertama | Satuan Polisi Pamong Praja | 8 | 1280 |
| 1074. | JF Perencana Ahli Pertama | Satuan Polisi Pamong Praja | 8 | 1280 |

| | | | | |
|-------|--|--|----|------|
| | | Praja | | |
| 1075. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Satuan Polisi Pamong Praja | 8 | 1280 |
| 1076. | Jf Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/ Mahir | Satuan Polisi Pamong Praja | 7 | 1095 |
| 1077. | Jf Polisi Pamong Praja Pelaksana/ Terampil | Satuan Polisi Pamong Praja | 6 | 745 |
| 1078. | Jf Polisi Pamong Praja Pemula | Satuan Polisi Pamong Praja | 5 | 580 |
| 1079. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja | 12 | 2115 |
| 1080. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja | 7 | 890 |
| 1081. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja | 6 | 690 |
| 1082. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja | 6 | 690 |
| 1083. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja | 5 | 490 |
| 1084. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1085. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1086. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1087. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1088. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | 11 | 2045 |
| 1089. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | 7 | 890 |
| 1090. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | 6 | 690 |
| 1091. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | 5 | 490 |
| 1092. | Kepala Seksi Pencegahan | Seksi Pencegahan | 9 | 1430 |
| 1093. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pencegahan | 7 | 890 |
| 1094. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pencegahan | 7 | 890 |
| 1095. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pencegahan | 6 | 690 |
| 1096. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi | Seksi Monitoring dan Evaluasi | 9 | 1430 |
| 1097. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Monitoring dan Evaluasi | 7 | 890 |
| 1098. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Monitoring dan Evaluasi | 6 | 690 |
| 1099. | Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 11 | 2045 |
| 1100. | Penata Layanan Operasional | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 7 | 890 |
| 1101. | Pengelola Trantibum | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 6 | 690 |

| | | | | |
|--|---|--|----|------|
| 1102. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 6 | 690 |
| 1103. | Pranata Trantibum | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5 | 490 |
| 1104. | Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan | Seksi Pengamanan dan Pengawasan | 9 | 1430 |
| 1105. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pengamanan dan Pengawasan | 7 | 890 |
| 1106. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pengamanan dan Pengawasan | 7 | 890 |
| 1107. | Pengelola Trantibum | Seksi Pengamanan dan Pengawasan | 6 | 690 |
| 1108. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pengamanan dan Pengawasan | 6 | 690 |
| 1109. | Pranata Trantibum | Seksi Pengamanan dan Pengawasan | 5 | 490 |
| 1110. | Kepala Seksi Data dan Informasi | Seksi Data dan Informasi | 9 | 1430 |
| 1111. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Data dan Informasi | 7 | 890 |
| 1112. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Data dan Informasi | 6 | 690 |
| 1113. | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur | Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur | 11 | 2045 |
| 1114. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur | 7 | 890 |
| 1115. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur | 6 | 690 |
| 1116. | Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur | Seksi Sumber Daya Aparatur | 9 | 1430 |
| 1117. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Sumber Daya Aparatur | 7 | 890 |
| 1118. | Penata Layanan Operasional | Seksi Sumber Daya Aparatur | 7 | 890 |
| 1119. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Sumber Daya Aparatur | 6 | 690 |
| 1120. | Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | 9 | 1430 |
| 1121. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | 7 | 890 |
| 1122. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | 7 | 890 |
| 1123. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | 6 | 690 |
| 1124. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | 6 | 690 |
| XXII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|----|------|
| 1125. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 14 | 2865 |
| 1126. | Jf Perencana Ahli Madya | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12 | 2170 |
| 1127. | Jf Perencana Ahli Muda | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 10 | 1610 |
| 1128. | Jf Analis Kebijakan Ahli Muda | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 10 | 1735 |
| 1129. | Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 9 | 1480 |
| 1130. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 9 | 1355 |
| 1131. | Jf Perencana Ahli Pertama | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 8 | 1280 |
| 1132. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 8 | 1280 |
| 1133. | Jf Penata Ruang Ahli Pertama | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8 | 1280 |
| 1134. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8 | 1280 |
| 1135. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/Terampil | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 6 | 740 |
| 1136. | Sekretaris Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12 | 2115 |
| 1137. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 7 | 890 |
| 1138. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Badan Perencanaan | 6 | 690 |

| | | | | |
|-------|---|---|----|------|
| | | Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | |
| 1139. | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1140. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1141. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1142. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1143. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 1144. | Operator Layanan Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3 | 340 |
| 1145. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1146. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | 11 | 2045 |
| 1147. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | 7 | 890 |
| 1148. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1149. | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan | Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan | 11 | 2045 |
| 1150. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan | 7 | 890 |
| 1151. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan | 6 | 690 |
| 1152. | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan | 11 | 2045 |
| 1153. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan | 7 | 890 |
| 1154. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, | 6 | 690 |

| | | | | |
|--|---|--|----|------|
| | | Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan | | |
| 1155. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Bidang Penelitian dan Pengembangan | 11 | 2045 |
| 1156. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Penelitian dan Pengembangan | 7 | 890 |
| 1157. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Penelitian dan Pengembangan | 6 | 690 |
| XXIII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1158. | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 14 | 2865 |
| 1159. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10 | 1610 |
| 1160. | Jf Perencana Ahli Muda | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10 | 1610 |
| 1161. | Jf Asesor SDM Aparatur Ahli Muda | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10 | 1610 |
| 1162. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9 | 1355 |
| 1163. | Jf Pranata Komputer Ahli Muda | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9 | 1355 |
| 1164. | Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 | 1280 |
| 1165. | Jf Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 | 1280 |
| 1166. | Jf Perencana Ahli Pertama | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 | 1280 |
| 1167. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 | 1280 |
| 1168. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/Terampil | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 | 740 |
| 1169. | Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 | 2115 |
| 1170. | Penelaah Teknis Kebijakan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 890 |
| 1171. | Pengolah Data dan Informasi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 | 690 |
| 1172. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |

| | | | | |
|---|---|--|----|------|
| 1173. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1174. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1175. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1176. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 1177. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1178. | Kepala Bidang Data, Formasi Dan Jabatan | Bidang Data, Formasi dan Jabatan | 11 | 2045 |
| 1179. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Data, Formasi dan Jabatan | 7 | 890 |
| 1180. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Data, Formasi dan Jabatan | 6 | 690 |
| 1181. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Data, Formasi dan Jabatan | 5 | 490 |
| 1182. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan | Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan | 11 | 2045 |
| 1183. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan | 7 | 890 |
| 1184. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan | 6 | 690 |
| 1185. | Pengadministrasi Perkantoran | Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan | 5 | 490 |
| XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | |
| 1186. | Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 14 | 2865 |
| 1187. | Jf Perencana Ahli Muda | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 10 | 1610 |
| 1188. | Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 9 | 1480 |
| 1189. | Jf Arsiparis Ahli Muda | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 9 | 1355 |
| 1190. | Jf Pranata Komputer Ahli Muda | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 9 | 1355 |
| 1191. | Jf Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 8 | 1280 |
| 1192. | Jf Perencana Ahli Pertama | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 8 | 1280 |
| 1193. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 8 | 1280 |

| | | | | |
|-------|---|--|----|------|
| 1194. | Jf Pranata Komputer Pelaksana /Terampil | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 6 | 740 |
| 1195. | Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah | Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah | 12 | 2115 |
| 1196. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah | 7 | 890 |
| 1197. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah | 6 | 690 |
| 1198. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah | 5 | 490 |
| 1199. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1200. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1201. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1202. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1203. | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | 11 | 2045 |
| 1204. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | 7 | 890 |
| 1205. | Penata Layanan Operasional | Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | 7 | 890 |
| 1206. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | 6 | 690 |
| 1207. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Sub Bidang Perbendaharaan | 9 | 1430 |
| 1208. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Perbendaharaan | 7 | 890 |
| 1209. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Perbendaharaan | 6 | 690 |
| 1210. | Kepala Sub Bidang Akuntansi | Sub Bidang Akuntansi | 9 | 1430 |
| 1211. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Akuntansi | 7 | 890 |
| 1212. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Akuntansi | 6 | 690 |
| 1213. | Kepala Bidang Anggaran | Bidang Anggaran | 11 | 2045 |
| 1214. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Anggaran | 7 | 890 |
| 1215. | Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran | Sub Bidang Perencanaan Anggaran | 9 | 1430 |
| 1216. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Perencanaan Anggaran | 7 | 890 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|----|------|
| 1217. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | Sub Bidang Penyusunan Anggaran | 9 | 1430 |
| 1218. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Penyusunan Anggaran | 7 | 890 |
| 1219. | Kepala Bidang Aset | Bidang Aset | 11 | 2045 |
| 1220. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Aset | 7 | 890 |
| 1221. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Aset | 6 | 690 |
| 1222. | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset | Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset | 9 | 1430 |
| 1223. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset | 7 | 890 |
| 1224. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset | 6 | 690 |
| 1225. | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset | Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset | 9 | 1430 |
| 1226. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset | 7 | 890 |
| 1227. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset | 6 | 690 |
| 1228. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset | 6 | 690 |
| XXV.BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 1229. | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | 14 | 2865 |
| 1230. | Jf Perencana Ahli Muda | Badan Pendapatan Daerah | 10 | 1610 |
| 1231. | Jf Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | Badan Pendapatan Daerah | 9 | 1480 |
| 1232. | Jf Perencana Ahli Pertama | Badan Pendapatan Daerah | 8 | 1280 |
| 1233. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Badan Pendapatan Daerah | 8 | 1280 |
| 1234. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Badan Pendapatan Daerah | 8 | 1280 |
| 1235. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Badan Pendapatan Daerah | 8 | 1280 |
| 1236. | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | Sekretariat Badan Pendapatan Daerah | 12 | 2115 |
| 1237. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Badan Pendapatan Daerah | 7 | 890 |
| 1238. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Badan Pendapatan Daerah | 6 | 690 |

| | | | | |
|-------|--|--|----|------|
| 1239. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1240. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1241. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1242. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 1243. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1244. | Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan | Bidang Pendataan dan Pelayanan | 11 | 2045 |
| 1245. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Pendataan dan Pelayanan | 7 | 890 |
| 1246. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Pendataan dan Pelayanan | 6 | 690 |
| 1247. | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran | Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran | 9 | 1430 |
| 1248. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran | 7 | 890 |
| 1249. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran | 6 | 690 |
| 1250. | Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Informasi | Sub Bidang Pelayanan dan Informasi | 9 | 1430 |
| 1251. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Pelayanan dan Informasi | 7 | 890 |
| 1252. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Pelayanan dan Informasi | 6 | 690 |
| 1253. | Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan | Bidang Penilaian dan Penetapan | 11 | 2045 |
| 1254. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Penilaian dan Penetapan | 7 | 890 |
| 1255. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Penilaian dan Penetapan | 6 | 690 |
| 1256. | Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak | Sub Bidang Penetapan Pajak | 9 | 1430 |
| 1257. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Penetapan Pajak | 7 | 890 |
| 1258. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Penetapan Pajak | 6 | 690 |
| 1259. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak | Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak | 9 | 1430 |
| 1260. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak | 7 | 890 |
| 1261. | Penata Layanan Operasional | Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak | 7 | 890 |

| | | | | |
|--|--|---|----|------|
| 1262. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak | 6 | 690 |
| 1263. | Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan | Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan | 11 | 2045 |
| 1264. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan | 7 | 890 |
| 1265. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan | 6 | 690 |
| 1266. | Kepala Sub Bidang Penagihan | Sub Bidang Penagihan | 9 | 1430 |
| 1267. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Penagihan | 7 | 890 |
| 1268. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Penagihan | 6 | 690 |
| 1269. | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan | Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan | 9 | 1430 |
| 1270. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan | 7 | 890 |
| 1271. | Penata Layanan Operasional | Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan | 7 | 890 |
| 1272. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan | 6 | 690 |
| XXVI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| 1273. | Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 14 | 2865 |
| 1274. | Jf Perencana Muda | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 10 | 1610 |
| 1275. | Jf Analis Kebijakan Muda | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 10 | 1735 |
| 1276. | Perencana Ahli Pertama | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 8 | 1280 |
| 1277. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 8 | 1280 |
| 1278. | Arsiparis Ahli Pertama | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 8 | 1280 |
| 1279. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 12 | 2115 |
| 1280. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 7 | 890 |
| 1281. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 690 |
| 1282. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 490 |

| | | | | |
|---|--|---|----|------|
| 1283. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1430 |
| 1284. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1285. | Penata Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1286. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1287. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 1288. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1289. | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa | Bidang Kesatuan Bangsa | 11 | 2045 |
| 1290. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Kesatuan Bangsa | 7 | 890 |
| 1291. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Kesatuan Bangsa | 6 | 690 |
| 1292. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | 11 | 2045 |
| 1293. | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | 7 | 890 |
| 1294. | Pengolah Data dan Informasi | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | 6 | 690 |
| XXVII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | |
| 1295. | Kepala Pelaksana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12 | 2315 |
| 1296. | Jf Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12 | 2170 |
| 1297. | Jf Analis Kebencanaan Ahli Madya | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12 | 2155 |
| 1298. | Jf Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9 | 1450 |
| 1299. | Jf Analis Kebencanaan Ahli Muda | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9 | 1435 |
| 1300. | Jf Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 1280 |
| 1301. | Jf Analis Kebencanaan Ahli Pertama | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 1220 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|------|
| 1302. | Jf Arsiparis Ahli Pertama | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 1280 |
| 1303. | Jf Perencana Ahli Pertama | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 1280 |
| 1304. | Jf Analis Kebijakan Ahli Pertama | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 1280 |
| 1305. | Jf Pranata Komputer Ahli Pertama | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 1280 |
| 1306. | Jf Pranata Pencarian Dan Pertolongan Pemula | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 695 |
| 1307. | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9 | 1430 |
| 1308. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7 | 890 |
| 1309. | Penata Layanan Operasional | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7 | 890 |
| 1310. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 690 |
| 1311. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 490 |
| 1312. | Pengelola Umum Operasional | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 190 |
| 1313. | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 9 | 1430 |
| 1314. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 7 | 890 |
| 1315. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 7 | 890 |
| 1316. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 6 | 690 |
| 1317. | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik | Seksi Kedaruratan dan Logistik | 9 | 1430 |
| 1318. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Kedaruratan dan Logistik | 7 | 890 |
| 1319. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Kedaruratan dan Logistik | 6 | 690 |
| 1320. | Operator Layanan Operasional | Seksi Kedaruratan dan Logistik | 5 | 490 |
| 1321. | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi | Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi | 9 | 1430 |
| 1322. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi | 7 | 890 |
| 1323. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi | 6 | 690 |

| XXVIII. KECAMATAN BATU | | | | |
|-------------------------------|---|--|----|------|
| 1324. | Camat Batu | Kecamatan Batu | 12 | 2315 |
| 1325. | Jf Perencana Ahli Pertama | Kecamatan Batu | 8 | 1280 |
| 1326. | Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Kecamatan Batu | 8 | 1280 |
| 1327. | Jf Arsiparis Terampil | Kecamatan Batu | 6 | 740 |
| 1328. | Jf Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil | Kecamatan Batu | 6 | 740 |
| 1329. | Sekretaris Kecamatan Batu | Sekretariat Kecamatan Batu | 11 | 2090 |
| 1330. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 9 | 1455 |
| 1331. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 7 | 890 |
| 1332. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 6 | 690 |
| 1333. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1455 |
| 1334. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1335. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1336. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1337. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 5 | 490 |
| 1338. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1339. | Kepala Seksi Pemerintahan | Seksi Pemerintahan | 9 | 1455 |
| 1340. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemerintahan | 7 | 890 |
| 1341. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan | 6 | 690 |
| 1342. | Kepala Seksi Pembangunan | Seksi Pembangunan | 9 | 1455 |
| 1343. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pembangunan | 7 | 890 |
| 1344. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pembangunan | 7 | 890 |
| 1345. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1346. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1347. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 9 | 1455 |
| 1348. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 7 | 890 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|----|------|
| 1349. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1350. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1351. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 9 | 1455 |
| 1352. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 890 |
| 1353. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 6 | 690 |
| 1354. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 9 | 1455 |
| 1355. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 7 | 890 |
| 1356. | Penata Layanan Operasional | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 7 | 890 |
| 1357. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXIX. KECAMATAN BUMIAJI | | | | |
| 1358. | Camat Bumiaji | Kecamatan Bumiaji | 12 | 2315 |
| 1359. | Jf Perencana Ahli Pertama | Kecamatan Bumiaji | 8 | 1280 |
| 1360. | Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Kecamatan Bumiaji | 8 | 1280 |
| 1361. | Sekretaris Kecamatan Bumiaji | Sekretariat Kecamatan Bumiaji | 11 | 2090 |
| 1362. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 9 | 1455 |
| 1363. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 7 | 890 |
| 1364. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 6 | 690 |
| 1365. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 5 | 490 |
| 1366. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1455 |
| 1367. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1368. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1369. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1370. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1371. | Kepala Seksi Pemerintahan | Seksi Pemerintahan | 9 | 1455 |
| 1372. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemerintahan | 7 | 890 |
| 1373. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pemerintahan | 7 | 890 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|----|------|
| 1374. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan | 6 | 690 |
| 1375. | Kepala Seksi Pembangunan | Seksi Pembangunan | 9 | 1455 |
| 1376. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pembangunan | 7 | 890 |
| 1377. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1378. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1379. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 9 | 1455 |
| 1380. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 7 | 890 |
| 1381. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1382. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1383. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 9 | 1455 |
| 1384. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 890 |
| 1385. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 6 | 690 |
| 1386. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 9 | 1455 |
| 1387. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 7 | 890 |
| 1388. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXX. KECAMATAN JUNREJO | | | | |
| 1389. | Camat Junrejo | Kecamatan Junrejo | 12 | 2315 |
| 1390. | Jf Perencana Ahli Pertama | Kecamatan Bumiaji | 8 | 1280 |
| 1391. | Jf Perencana Ahli Pertama | Kecamatan Bumiaji | 8 | 1280 |
| 1392. | Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Kecamatan Bumiaji | 8 | 1280 |
| 1393. | Sekretaris Kecamatan Junrejo | Sekretariat Kecamatan Junrejo | 11 | 2090 |
| 1394. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 9 | 1455 |
| 1395. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 7 | 890 |
| 1396. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 6 | 690 |
| 1397. | Pengadministrasi Perkantoran | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | 5 | 490 |
| 1398. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 9 | 1455 |
| 1399. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 7 | 890 |
| 1400. | Penata Layanan | Sub Bagian Keuangan, | 7 | 890 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|------|
| | Operasional | Umum, dan Kepegawaian | | |
| 1401. | Pengelola Layanan Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1402. | Pengolah Data dan Informasi | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 6 | 690 |
| 1403. | Pengelola Umum Operasional | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | 1 | 190 |
| 1404. | Kepala Seksi Pemerintahan | Seksi Pemerintahan | 9 | 1455 |
| 1405. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemerintahan | 7 | 890 |
| 1406. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan | 6 | 690 |
| 1407. | Kepala Seksi Pembangunan | Seksi Pembangunan | 9 | 1455 |
| 1408. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pembangunan | 7 | 890 |
| 1409. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1410. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan | 6 | 690 |
| 1411. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 9 | 1455 |
| 1412. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 7 | 890 |
| 1413. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1414. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1415. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 9 | 1455 |
| 1416. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 890 |
| 1417. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 6 | 690 |
| 1418. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 9 | 1455 |
| 1419. | Penelaah Teknis Kebijakan | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 7 | 890 |
| 1420. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXXI KELURAHAN NGAGLIK | | | | |
| 1421. | Lurah Ngaglik | Kelurahan Ngaglik | 9 | 1540 |
| 1422. | Sekretaris Kelurahan Ngaglik | Sekretariat Kelurahan | 8 | 1320 |
| 1423. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Kelurahan | 7 | 890 |
| 1424. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1425. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1426. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Kelurahan | 5 | 490 |
| 1427. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan | 8 | 1295 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------|
| | Ketertiban | Ketertiban | | |
| 1428. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1429. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1430. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 8 | 1295 |
| 1431. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 7 | 890 |
| 1432. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 6 | 690 |
| 1433. | Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1295 |
| 1434. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXXII. KELURAHAN SONGGOKERTO | | | | |
| 1435. | Lurah Songgokerto | Kelurahan Songgokerto | 9 | 1540 |
| 1436. | Sekretaris Kelurahan Songgokerto | Sekretariat Kelurahan | 8 | 1320 |
| 1437. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Kelurahan | 7 | 890 |
| 1438. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1439. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1440. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Kelurahan | 5 | 490 |
| 1441. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 8 | 1295 |
| 1442. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1443. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1444. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 8 | 1295 |
| 1445. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 7 | 890 |
| 1446. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 6 | 690 |
| 1447. | Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1295 |
| 1448. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXXIII. KELURAHAN SISIR | | | | |
| 1449. | Lurah Sisir | Kelurahan Sisir | 9 | 1540 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|------|
| 1450. | Sekretaris Kelurahan Sisir | Sekretariat Kelurahan | 8 | 1320 |
| 1451. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Kelurahan | 7 | 890 |
| 1452. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1453. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1454. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Kelurahan | 5 | 490 |
| 1455. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 8 | 1295 |
| 1456. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1457. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1458. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 8 | 1295 |
| 1459. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 7 | 890 |
| 1460. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 6 | 690 |
| 1461. | Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1295 |
| 1462. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXXIV. KELURAHAN TEMAS | | | | |
| 1463. | Lurah Temas | Kelurahan Temas | 9 | 1540 |
| 1464. | Sekretaris Kelurahan Temas | Sekretariat Kelurahan | 8 | 1320 |
| 1465. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Kelurahan | 7 | 890 |
| 1466. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1467. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1468. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Kelurahan | 5 | 490 |
| 1469. | Pengelola Umum Operasional | Sekretariat Kelurahan | 1 | 190 |
| 1470. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 8 | 1295 |
| 1471. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1472. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1473. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 8 | 1295 |
| 1474. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 6 | 690 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|------|
| 1475. | Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1295 |
| 1476. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |
| XXXV. KELURAHAN DADAPREJO | | | | |
| 1477. | Lurah Dadaprejo | Kelurahan Dadaprejo | 9 | 1540 |
| 1478. | Sekretaris Kelurahan Dadaprejo | Sekretariat Kelurahan | 8 | 1320 |
| 1479. | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Kelurahan | 7 | 890 |
| 1480. | Pengelola Layanan Operasional | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1481. | Pengolah Data dan Informasi | Sekretariat Kelurahan | 6 | 690 |
| 1482. | Pengadministrasi Perkantoran | Sekretariat Kelurahan | 5 | 490 |
| 1483. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 8 | 1295 |
| 1484. | Pengelola Layanan Operasional | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1485. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban | 6 | 690 |
| 1486. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 8 | 1295 |
| 1487. | Penata Layanan Operasional | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 7 | 890 |
| 1488. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | 6 | 690 |
| 1489. | Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 8 | 1295 |
| 1490. | Pengolah Data dan Informasi | Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | 6 | 690 |

WALI KOTA BATU,

NUROCHMAN

